

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan sukarela atas laporan tahunan perusahaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara. Penelitian mengenai tingkat pengungkapan sukarela dilakukan di negara-negara maju seperti Perancis (Kateb, 2012; Paros *et al.*, 2013), Spanyol (Domínguez & Gámez, 2013). Beberapa penelitian juga dilakukan di China (Xiao & Yuan, 2007; Wang & Mu, 2008; Lan *et al.*, 2013; Wen Qu *et al.*, 2013), Australia (Percy, 2000), United State (Botosan, 1997; Hossain & Mitra, 2006).

Penelitian juga dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia (Hardiningsih, 2008), Malaysia (Akhtaruddin *et al.*, 2009; Akhtaruddin & Haron, 2010; Htay, 2012; Mukhtar & Ramasamy, 2013; Otham *et al.*, 2014), India (Nandi & Ghosh, 2012), Yordania (Al-Akra *et al.*, 2010; Hamour, 2014; Omar & Simon, 2011; Sartawi *et al.*, 2014; Alhazaimah *et al.*, 2014), United Arab Emirate (Hassan, 2013), Croasia (Barac *et al.*, 2014), Egypt (Samaha & Dahawy, 2010).

Menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur kepemilikan (Hossain & Mitra, 2006; Xiao & Yuan, 2007; Karagul & Yonet, 2010; Akhtaruddin & Haron, 2010; Rouf & Al-Harun, 2011; Juhmani, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014; Ramadhan, 2014) dan

karakteristik dewan (Barako, 2007; Rouf, 2011; Htay, 2012; Uyar *et al.*, 2013; Damagum & Chima, 2013; Sweiti & Attayah, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014).

Variabel yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu adalah kepemilikan institutional (Hossain & Mitra, 2006; Wang & Mu, 2008; Al-Akra *et al.*, 2010; Omar & Simon, 2011; Rouf & Al-Harun, 2011; Htay, 2012; Uyar *et al.*, 2013; Sartawi *et al.*, 2014), kepemilikan asing (Barako *et al.*, 2006; Akhtaruddin & Hossain, 2008; Al-Akra *et al.*, 2010; Hassan, 2013; Dhouibi & Mamoghli, 2013; Wen Qu *et al.*, 2013), kepemilikan pemerintah (Xiao & Yuan, 2007; Wang & Mu, 2008; Samaha & Dahawy, 2010; Wen Qu *et al.*, 2013; Yang *et al.*, 2013; Juhmani, 2013; Al-Janadi *et al.*, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014), kepemilikan manajerial (Hossain & Mitra, 2006; Xiao & Yuan, 2007; Samaha & Dahawy, 2010; Chakroun & Matoussi, 2012; Kateb, 2012; Juhmani, 2013), dan jumlah pemegang saham (Percy, 2000; Samaha & Dahawy, 2010; Omar & Simon, 2011; Chakroun & Matoussi, 2012; Mukhtar & Ramasamy, 2013; Sweiti & Attayah, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karagul dan Yonet (2010), selain menggunakan kelima variabel tersebut juga menambahkan variabel kepemilikan keluarga dan auditor independen dalam penelitiannya di Turki.

Faktor-faktor lain yang diteliti untuk mengetahui pengaruh yang ada terhadap pengungkapan sukarela adalah jumlah rapat dewan komisaris dan direksi (Domínguez & Gámez, 2013; Wen Qu *et al.*, 2013; Baros *et al.*, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014), ukuran dewan direksi (Barako, 2007; Akhtaruddin *et al.*, 2009; Karagul & Yonet, 2010; Rouf, 2011; Ling & Lee, 2012; Uyar *et al.*, 2013;

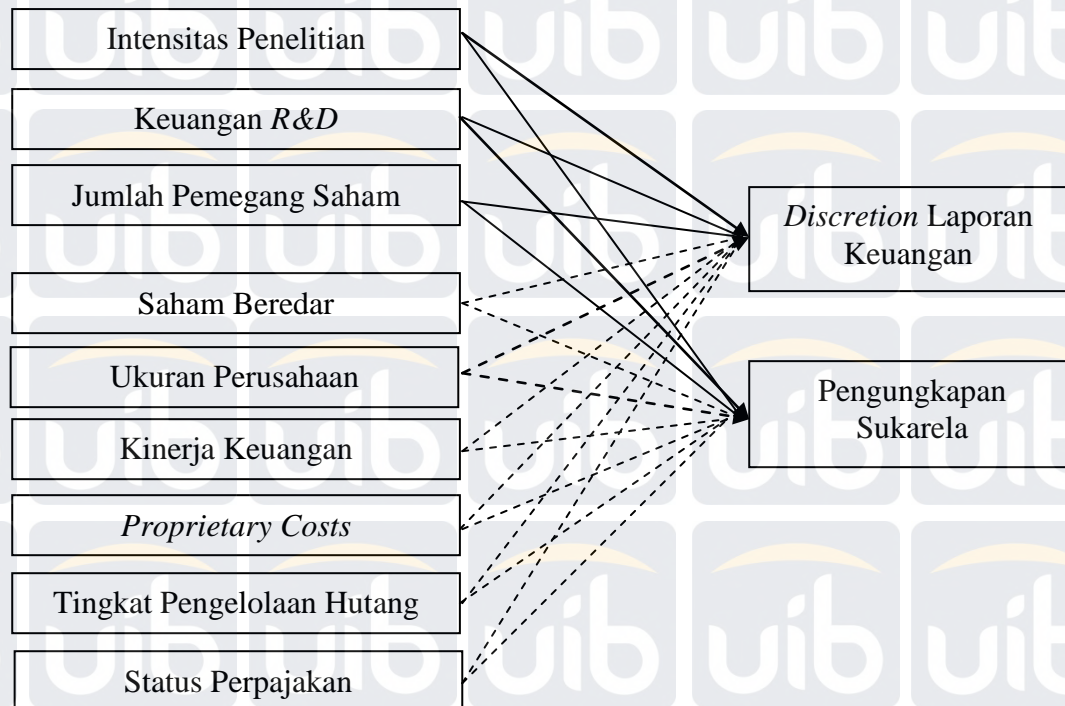
Ramadhan, 2014), dan jumlah komisaris independen (Wang & Mu, 2008; Samaha & Dahawy, 2010; Bhasin *et al.*, 2012; Uyar *et al.*, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014).

Faktor mengenai karakteristik komite audit dan karakteristik perusahaan juga banyak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian mengenai pengungkapan sukarela. Barako *et al.* (2006) dan Barako (2007) menggunakan salah satu variabel dari karakteristik komite audit yakni variabel tipe auditor (*Big 4*). Selain variabel ukuran auditor (*Big 4*), Al-Janadi *et al.* (2013) dan Othman *et al.* (2014) juga menambahkan variabel independen komite audit dan ukuran komite audit.

Penelitian mengenai pengungkapan sukarela dilakukan oleh Botosan pada tahun 1997 di Amerika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan tingkat pengungkapan dan biaya ekuitas dengan menggunakan variabel independen yakni biaya ekuitas, *analyst*, nilai pasar ekuitas, ukuran perusahaan, jumlah karyawan.

Percy (2000) meneliti *discretion* pada laporan keuangan dan pengungkapan sukarela dengan menggunakan variabel intensitas penelitian (*R&D expenditure*), keberadaan pengaturan keuangan *R&D*, jumlah pemegang saham sebagai variabel independen dan saham beredar, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, *proprietary costs*, tingkat pengelolaan hutang, dan status perpajakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan di Australia. Model penelitian yang sebelumnya telah dilakukan Percy (2000) dapat dilihat dari tampilan Gambar

2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model penelitian *discretion* pada laporan keuangan dan pengungkapan sukarela di Australia, sumber: Percy (2000).

Penelitian-penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan sukarela dilakukan Hossain dan Mitra (2006). Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing sebagai variabel independen dan kompensasi saham direksi, jumlah kekayaan direksi, ukuran perusahaan, tingkat pengelolaan hutang, nilai pasar ekuitas, tingkat multinasionalitas, *analyst*, pengembalian tahunan, dan standar deviasi pada pengembalian saham tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di *Dow Jones Interactive* dan *The10Qs*.

Barako (2007) dan Rouf (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan

terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang melibatkan 54 perusahaan yang bergerak dibidang pertanian, komersial dan jasa, keuangan dan investasi, dan industri dan sejenisnya di Kenya adalah jumlah komisaris independen, struktur kepemimpinan dewan direksi, jumlah dewan direksi, jumlah komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, tingkat pengelolaan hutang, ukuran auditor eksternal, profitabilitas sebagai variabel independen dan jenis industri sebagai variabel kontrol. Variabel-variabel lain juga ditambahkan dalam penelitian, jumlah pemegang saham, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, ukuran auditor, aktivitas internasional perusahaan, dan likuiditas (Samaha & Dahawy, 2010; Htay, 2012), umur perusahaan (Hossain & Hammami, 2009; Arif & Tuhin, 2013; Soliman, 2013), kompleksitas dan aset berwujud (Hossain & Hammami, 2009), status *listing* dan umur *listing* perusahaan (Omar & Simon, 2011), dan *Tobin Q* (Modarres *et al.*, 2014).

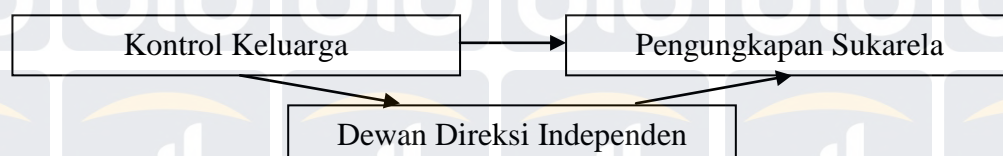
Akhtaruddin *et al.* (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dengan menggunakan variabel independen yakni jumlah komisaris independen, kepemilikan asing, ukuran dewan direksi, jumlah komite audit, dan kontrol keluarga. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, teknologi, produk konsumen, produk industri, jasa, dan properti yang terdaftar di Malaysia pada tahun 2002.

Beberapa penelitian lain telah banyak di Malaysia. Ling dan Lee (2012) meneliti tentang struktur tata kelola perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan sukarela. Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi

pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2006 dan 2009. Variabel yang digunakan antara lain struktur tata kelola yang pengukurannya menggunakan sistem skor tata kelola, konsentrasi kepemilikan sebagai variabel independen, dan ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat pengelolaan hutang, ukuran dewan direksi, serta ukuran kantor auditor sebagai variabel kontrol.

Penelitian serupa juga dilakukan Mukhtar dan Ramasamy (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh variabel-variabel fundamental terhadap pengungkapan sukarela perusahaan melalui *modified entropy* model. Penelitian ini menggunakan variabel margin laba operasional (*profit margin*), umur perusahaan, jumlah pemegang saham, profitabilitas perusahaan yang dihitung menggunakan tingkat pengembalian modal (ROE), likuiditas, dan tingkat pengelolaan hutang sebagai variabel independen.

Chakroun (2013) melakukan penelitian mengenai kontrol keluarga, dewan direksi independen dan tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan Tunisia. Chakroun (2013) menggunakan variabel kontrol perusahaan sebagai variabel independen dan dewan direksi independen sebagai variabel mediasi dalam penelitian yang melibatkan perusahaan non keuangan. Model penelitian yang sebelumnya telah dilakukan Chakroun (2013) dapat dilihat dari tampilan Gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model penelitian kontrol keluarga, dewan direksi independen dan pengungkapan sukarela di Tunisia, sumber: Chakroun (2013).

Penelitian secara spesifik juga dilakukan Othman *et al.* (2014) dengan menggunakan variabel karakteristik komite audit sebagai variabel independen.

Beberapa variabel yang termasuk dalam karakteristik komite audit yang digunakan adalah persentase independen komite audit, persentase jumlah komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, *audit tenure*, dan direksi dalam komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan sukarela pada 94 perusahaan terbaik di Bursa Malaysia.

2.2 Pengungkapan Sukarela

2.2.1 Pengungkapan

Pengungkapan berarti memberikan informasi mengenai perusahaan yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Secara spesifik, pengungkapan atas laporan keuangan menolong investor untuk lebih mengenai keadaan perusahaan, sehingga mengurangi perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan meningkatkan pengungkapan untuk menghindari potensi tekanan dari peraturan yang mengatur (Akhtaruddin *et al.*, 2009).

2.2.2 Pengungkapan Wajib dan Sukarela

Ghasempour dan Yusof (2014) mendefinisikan pengungkapan sebagai pentransferan dan penyajian informasi ekonomi yang berhubungan dengan satatus keuangan dan kinerja perusahaan, baik keuangan maupun bukan keuangan, kuantitatif atau dalam bentuk lain. Jika pengungkapan perusahaan dikarenakan persyaratan hukum, pengungkapan ini disebut sebagai pengungkapan wajib, dan bila tidak diwajibkan oleh peraturan tertentu, itu dianggap sebagai pengungkapan sukarela.

Terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib dan sukarela. Uyar *et al.* (2012) menjelaskan bahwa pengungkapan wajib secara khusus berfokus pada penyajian laporan keuangan dan kelengkapan catatan kaki yang diwajibkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang, sedangkan pengungkapan sukarela mengizinkan manajemen bebas dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan.

Terdapat dua metode untuk mengukur indeks pengungkapan sukarela, yaitu:

1. Metode *weighted disclosure index*, yaitu pemberian bobot berdasarkan subjektifitas ketika preferensi pengguna tidak mengetahui penetapan bobot untuk setiap item yang serupa (Ling & Lee, 2012). Contoh peneliti yang menggunakan metode ini adalah Barako (2007), Ghasempour dan Yusof (2014).
2. Metode *unweighted disclosure index*, yaitu semua pengungkapan informasi pada laporan keuangan tahunan diberikan nilai bobot yang

sama. Pendekatan skor tertimbang mengasumsikan bahwa setiap item pengungkapan sama pentingnya bagi pengguna informasi (Ling & Lee, 2012).

Yu dan Jiangliang (2012) membagi jenis pengungkapan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Berikut ini adalah perbedaan antara pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib:

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela

Item	Pengungkapan Wajib	Pengungkapan Sukarela
Definisi	Informasi yang harus diungkapkan berdasarkan peraturan sekuritas, prinsip akuntansi, dan regulasi	Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan publik untuk menjaga reputasi perusahaan, hubungan dengan investor, penghindaran risiko pendakwaan untuk keuntungan perusahaan.
Motif	Motif pengungkapan berdasarkan peraturan dan regulasi untuk penyesuaian komunikasi informasi antara perusahaan publik dengan terkait	Motif pengungkapan berdasarkan kepentingan perusahaan itu sendiri dalam mengkomunikasikan perusahaan dengan pihak terkait

Item	Pengungkapan Wajib	Pengungkapan Sukarela
Isi	Pengenalan perusahaan, informasi dasar bisnis dan keuangan, informasi dewan dan manajer teratas, transaksi penting, penjelasan <i>item-item</i> penting	Berupa strategi perusahaan ke depan, perencanaan penelitian dan pengembangan, prediksi, informasi pembelian dan <i>merger</i> , analisis investasi proyek, dan informasi keuangan
Laporan pengungkapan	Laporan keuangan tahunan, laporan interim, laporan musiman	Laporan keuangan tahunan, pemberitahuan publik, brosur, <i>website</i> , dan pamphlet.
Item	Pengungkapan Wajib	Pengungkapan Sukarela
Waktu	Sekali dalam setahun atau musiman	Pada waktu yang benar
Mekanisme keseimbangan	Regulasi, peraturan, dan hukuman	Desain dan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan
Dasar pengungkapan	Monopoli perusahaan atas informasi perusahaan itu sendiri	Globalisasi ekonomi dan pasar kapital

Sumber: Yu dan Jiangliang (2012).

2.2.3 Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela merupakan insentif yang dimiliki oleh manajemen dalam menyediakan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan bagi pengguna laporan tahunan perusahaan (Meek *et al.*, 1995; Nasir, 2004). Semakin banyak informasi yang diungkapkan akan meningkatkan transparansi, mengurangi perilaku oportunistik, dan informasi asimetris sehingga manajemen tidak dapat membatasi informasi penting yang dapat meningkatkan keuntungan dan kinerja perusahaan (Apostolos & Konstantinos, 2009).

Htay (2012) mempertegas pernyataan Apostolos dan Konstantinos (2009) bahwa pengungkapan informasi sangat penting dan merupakan jantung dari tata kelola perusahaan. Pengungkapan sukarela didefinisikan sebagai informasi yang diberikan di luar dari informasi yang diberikan dalam laporan keuangan perusahaan dan informasi yang diberikan tidak secara eksplisit dibutuhkan serta diatur oleh aturan ataupun standar akuntansi (FASB, 2011).

2.3 Pengaruh Variabel Jumlah Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela

Dominguez dan Games (2014) mengungkapkan bahwa jumlah rapat dewan direksi adalah total rapat yang dilakukan oleh dewan direksi dalam suatu perusahaan. Menurut Alhazaimah *et al.* (2014), jumlah rapat dewan direksi didefinisikan sebagai jumlah rapat yang dilakukan oleh para dewan direksi dalam setiap tahun.

Semakin banyak jumlah rapat direksi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka semakin berperan dalam peningkatan pengungkapan informasi sukarela perusahaan (Wen Qu *et al.*, 2013; Baros *et al.*, 2013). Hal ini disebabkan dengan jumlah rapat yang semakin sering dilakukan, menunjukkan adanya implikasi dalam membahas tentang pengembangan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen (Dominguez & Games, 2014). Sehingga rapat dewan direksi yang dilakukan sangat berkontribusi dalam menghasilkan sebuah informasi terutama informasi-informasi sukarela yang akan disajikan di dalam laporan tahunan (Wen Qu *et al.*, 2013; Baros *et al.*, 2013).

Penelitian yang dilakukan Baros *et al.* (2013), Wen Qu *et al.* (2013), Dominguez dan Games (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian lain menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela (Dominguez *et al.*, 2013; Alhazzaimh *et al.*, 2014).

2.4 Pengaruh Variabel Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sukarela

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Direksi memiliki lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Tingkat atas pengungkapan pada suatu perusahaan merupakan keputusan yang bersifat

strategis, yang dibuat dan atas persetujuan dewan direksi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan manajemen, dewan direksi dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang harus dilaksanakan oleh para manajer (Chen & Jaggi, 2000). Menurut Alhazaimeh *et al.* (2014), ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan keseluruhan jumlah direksi pada perusahaan. Ukuran dewan direksi menyatakan total jumlah dewan direksi pada setiap perusahaan (Akhtaruddin *et al.*, 2009; Sweiti & Attayah, 2013). Jumlah dewan direksi yang dianggap efektif dalam suatu perusahaan, setidaknya tidak lebih dari tujuh atau delapan anggota dewan direksi (Jansen, 1983; Ozkan, 2004).

Akhtaruddin *et al.* (2009) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah direksi, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah dewan direksi, maka perusahaan akan terisi dengan para dewan direksi yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang bervariasi, sehingga kebutuhan dalam keterbukaan informasi akan semakin tinggi.

Penelitian terhadap ukuran dewan direksi yang dilakukan Barako (2007) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Akhtaruddin *et al.* (2009), Karagul dan Yonet (2010), Rouf (2011), Htay (2012), Nandi dan Ghosh (2012), Al-Janadi *et al.* (2013), Uyar *et al.* (2013), Damagum dan Chima (2013), Sweiti dan Attayah (2013), dan Rouf *et al.* (2014).

Penelitian terhadap ukuran dewan direksi yang dilakukan oleh Bhasin *et al.* (2012), Dhouibi dan Mamoghli (2013), dan Dominguez *et al.* (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan ukuran dewan direksi yang besar akan menimbulkan pengaruh negatif pada keefektifitas dalam manajemen. Semakin besar ukuran dewan direksi, pada umumnya akan mengurangi rasa motivasi dewan direksi dalam berpartisipasi dalam strategi pengambilan keputusan (Huther, 1997; Dhouibi & Mamoghli, 2013).

Hassan (2013) menemukan bahwa tidak ada hubungan antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dhouibi dan Mamoghi (2013), Wen Qu *et al.* (2013), Alhazaimh *et al.* (2014), Sartawi *et al.* (2014), Sartawi *et al.* (2013) dan Ramadhan (2014).

2.5 Pengaruh Variabel Jumlah Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sukarela

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja direksi dalam menjalankan usaha perseroan. Dewan komisaris memberikan masukan dan pertimbangan lain mengenai isu-isu material kepada direksi dan mendorong penerapan tata kelola yang baik di lingkungan perseroan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Chakroun (2013) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan keluarga dengan manajemen dan tidak memiliki saham yang signifikan dalam perusahaan.

Menurut BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012, komisaris independen dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Anggota komisaris yang tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
3. Anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
4. Anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Menurut Chakroun (2013), jumlah komisaris independen merupakan proporsi dari jumlah komisaris independen dan total dewan direksi dan komisaris.

Semakin tinggi jumlah komisaris independen akan meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela yang akan diungkapkan oleh perusahaan (Akhtaruddin &

Hossain, 2008). Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah komisaris independen maka akan menyebabkan tekanan yang lebih besar terhadap manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen akan terdorong untuk bertindak semakin objektif dan melindungi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mendorong kualitas laporan tahunan dan pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan perusahaan (Suta & Laksito, 2012; Chakroun, 2013).

Akhtaruddin dan Hossain (2008), Akhtaruddin *et al.* (2009), Samaha dan Dahawy (2010), Akhtaruddin dan Haron (2010), Karagul dan Yonet (2010), Bhasin *et al.* (2012), Htay (2012), Al-Janadi *et al.* (2013), Dhouibi dan Mamoghi (2013), Damagum dan Chima (2013), Sweiti dan Attayah (2013), Baros *et al.* (2013), Uyar *et al.* (2013), dan Chakroun (2013) menemukan pengaruh signifikan positif antara jumlah komisaris independen dengan pengungkapan sukarela. Jumlah komisaris independen dari suatu perusahaan juga telah dikaitkan secara negatif dengan praktek pengungkapan sukarela (Barako *et al.*, 2006; Barako, 2007; Al-Moataz & Hussainey, 2007; Rouf & Al-Harun, 2011; Chakroun & Matoussi, 2012; Nandi & Ghosh, 2012; dan Rouf *et al.*, 2014).

Penelitian lain menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen tidak memiliki hubungan signifikan terhadap pengungkapan sukarela (Wang & Mu, 2008; Al-Akra *et al.*, 2010; Dominguez *et al.*, 2013; Yang *et al.*, 2013; Fathi, 2013; Wen Qu *et al.*, 2013; Ramadhan, 2014; Sartawi *et al.*, 2014; dan Alhazaimh *et al.*, 2014).

2.6 Pengaruh Variabel Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Sukarela

Menurut Bokpin dan Isshaq (2009), kepemilikan asing adalah sebuah mekanisme dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Kepemilikan asing merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor asing dari total saham yang beredar (Al-Janadi *et al.*, 2013).

Pengungkapan sukarela semakin tinggi dengan meningkatnya kepemilikan asing (Al-Akra *et al.*, 2010). Hal ini dikarenakan investor asing menaruh perhatian lebih pada tata kelola perusahaan melebihi investor domestik (Neifar & Halioui, 2013). Investor asing pada umumnya sangat memonitor manajemen dan membutuhkan standar pengungkapan yang kuat untuk menjamin kualitas atas informasi yang komparatif (Boubakri *et al.*, 2005). Pernyataan Hassan (2013) memperkuat argumen Boubakri *et al.* (2005), Al-Akra *et al.* (2010), Neifar dan Halioui (2013) bahwa meningkatnya investor asing dalam suatu perusahaan memungkinkan perusahaan menuju pada penyediaan informasi-informasi yang berkualitas termasuk informasi sukarela perusahaan.

Kepemilikan asing dari suatu perusahaan memiliki pengaruh secara positif dengan praktek pengungkapan sukarela (Boubakri *et al.*, 2005; Barako *et al.*, 2006; Barako, 2007; Akhtaruddin & Hossain, 2008; Akhtaruddin *et al.*, 2009; Al-Akra *et al.*, 2010; Wen Qu *et al.*, 2013; Sartawi *et al.*, 2014; dan Alhazaimh *et al.*, 2014). Bokpin dan Isshaq (2009), Dhouibi dan Mamoghi (2013) dan Hassan

(2013) menemukan pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

Neifar dan Halioui (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan asing dengan pengungkapan sukarela pada suatu perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Al-Janadi *et al.* (2013) dan Barac *et al.* (2014).

2.7 Pengaruh Variabel Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan pemerintah merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah atas saham yang beredar (Al-Janadi *et al.*, 2013; Alhazaimah *et al.*, 2014). Semakin tinggi kepemilikan pemerintah, maka semakin tinggi poin pengungkapan sukarela akan semakin meningkat (Ismail & El-Shaib, 2012).

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar akan didorong oleh pihak pemerintah untuk mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk informasi sukarela. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas (Haji & Ghazali, 2013).

Al-Akra *et al.* (2010) melakukan penelitian mengenai kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil dari penelitian antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan sukarela berpengaruh positif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Akra *et al.* (2010), konsisten dengan Yang *et al.* (2013) dan Alhazaimah *et al.* (2014).

Samaha dan Dahawy (2010), Al-Janadi *et al.* (2013), Dhouibi dan Mamoghi (2013), dan Wen Qu *et al.* (2013) melakukan penelitian serupa dan menemukan pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela. Beberapa penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Mu (2008), Al-Akra *et al.* (2010), dan Juhmani (2013).

2.8 Pengaruh Variabel Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sukarela

Investor institusional memiliki insentif yang besar dalam memonitor praktek pengungkapan sukarela perusahaan (Rouf & Al-Harun, 2011).

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari total saham yang beredar (Ntim *et al.*, 2013).

Semakin tinggi kepemilikan institusi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan (Ntim *et al.*, 2013). Hal ini dikarenakan kepemilikan investor institusional seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Moh'd *et al.* (1998) menuturkan bahwa investor institusional disebut sebagai *monitoring agents*. Oleh sebab itu, dalam manajemen perusahaan investor institusional merupakan pemilik saham terbesar yang memiliki insentif yang kuat dalam memantau praktik pengungkapan sukarela perusahaan (Barako, 2007).

Penelitian terhadap kepemilikan institusional pada pengungkapan sukarela dilakukan Barako (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wang dan Mu (2008), Karagul dan Yonet (2010), Rouf dan Al-Harun (2011), Htay (2012), Uyar *et al.* (2013), dan Yang *et al.* (2013).

Penelitian terhadap kepemilikan institusional pada pengungkapan sukarela juga dilakukan Hossain dan Mitra (2006), Samaha dan Dahawy (2010), Chakroun dan Matoussi (2012), Dhouibi dan Mamoghi (2013), Juhmani (2013), dan Alhazaimh *et al.* (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Al-Akra *et al.* (2010) melakukan penelitian mengenai hubungan antara variabel kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kepemilikan institusional pada pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Omar dan Simon (2011), Kolsi (2012), Fathi (2013), Sartawi *et al.* (2014) dan Ramadhan (2014).

2.9 Pengaruh Variabel Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris (Faisal & Firmansyah, 2005). Menurut

Akhtaruddin dan Haron (2010), kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel tata kelola perusahaan yang mencerminkan pengaruh dari pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan pengungkapan perusahaan.

Menurut Hossain *et al.* (2006) dan Rouf dan Al-Harun (2011) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah tingkat pengungkapan sukarela.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah agensi muncul ketika pemilik (prinsipal) mempekerjakan seorang untuk menjalankan perusahaan tetapi manajer tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajer untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Aktivitas tersebut contohnya menyajikan informasi laba perusahaan secara berlebihan, melalaikan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa manajer memiliki dorongan untuk tidak memberikan informasi-informasi perusahaan kepada pihak luar perusahaan demi keuntungan pribadinya sendiri.

Baros *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan Samaha dan Dahawy (2010), menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sartawi *et al.* (2014).

Hasil penelitian serupa juga ditemukan Hossain dan Mitra (2006), Kateb (2012), dan Rouf *et al.* (2014). Penelitian yang dilakukan Juhmani (2013)

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

2.10 Pengaruh Variabel Jumlah Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Sukarela

Jumlah pemegang saham merupakan penjumlahan dari keseluruhan jumlah pemegang saham pada setiap perusahaan (Sweiti & Attayah, 2013).

Menurut Samaha dan Dahawy (2010), jumlah pemegang saham didenifisikan sebagai jumlah pemiliki saham dalam satu perusahaan.

Menurut Sweiti dan Attayah (2013), semakin besar jumlah pemegang saham maka semakin besar informasi yang diinginkan oleh setiap pemegang saham tersebut sehingga berefek pada semakin besarnya informasi sukarela yang harus diungkapkan oleh perusahaan pada laporan tahunan. Jumlah pemegang saham digunakan untuk menyelidiki hubungan antara pengungkapan dalam perusahaan (Omar & Simon, 2011). Dalam penelitian Percy (2000) menjelaskan bahwa jumlah pemegang saham memberikan pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Artinya peningkatan jumlah pemegang saham berbanding seajar dengan peningkatan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh yang sama juga terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan Samaha dan Dahawy (2010), Omar dan Simon (2011), Chakroun dan Matoussi (2012), dan Sweiti dan Attayah (2013). Penelitian-penelitian tersebut mendukung hasil penelitian Percy (2000) bahwa jumlah pemegang saham juga memberikan

pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Chau dan Gray (2002) menemukan bahwa perusahaan dengan jumlah pemegang saham yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan informasi yang tinggi dalam laporan tahunan.

Berbeda hasil dengan Mukhtar dan Ramasamy (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah pemegang saham dan pengungkapan sukarela perusahaan. Mukhtar dan Ramasamy (2013) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Alhazaimh *et al.* (2014) membantah hasil penelitian sebelumnya dan menyatakan bahwa jumlah pemegang saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pengungkapan sukarela melalui penelitian yang dilakukannya.

2.11 Pengaruh Variabel Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Sukarela

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.

Tipe industri merupakan klasifikasi perusahaan ke dalam beberapa kategori jenis industri. Omar dan Simon (2011) membagi tipe industri yakni 1 poin untuk perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan 0 poin untuk perusahaan yang bergerak dibidang lain selain manufaktur.

Abdullah dan Ismail (2008) berargumen bahwa perusahaan yang bergerak dibidang industri memiliki motivasi yang tinggi dalam menyampaikan informasi pengungkapan sukarela untuk mengurangi biaya keagenan. Selain itu, tipe industri merupakan indikator penting dalam memprediksi rasio pengungkapan perusahaan.

Omar dan Simon (2011) mempercayai bahwa jumlah pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat berbeda tergantung perbedaan dari setiap sektor industri. Sehingga Omar dan Simon (2011) menegaskan bahwa tipe industri merupakan salah satu variabel yang menentukan luasnya pengungkapan sukarela antar masing-masing industri. Barac *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang besar daripada sektor perdagangan, perbankan, asuransi, dan konsultasi bisnis.

Tipe industri telah dikaitkan secara positif dengan praktik pengungkapan sukarela (Barako, 2006; Barako *et al.*, 2007; Al-Akra *et al.*, 2010; Samaha & Dahawy, 2010; Omar & Simon, 2011; Kolsi, 2012; Al-Janadi *et al.*, 2013; Ibrahim, 2014; dan Barac *et al.*, 2014). Meek *et al.* (1995) mengungkapkan bahwa relevansi indikator pengungkapan dapat dipilih dari berbagai sektor industri. Oleh karena itu, sektor industri merupakan faktor penjelas tambahan yang baik dalam pengungkapan sukarela (Samaha & Dahawy, 2010).

Menurut Kateb (2012) mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tipe industri terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Kateb (2012), konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dominguez *et al.* (2013) dan Hassan (2013).

2.12 Pengaruh Variabel Tingkat Pengelolaan Hutang Terhadap Pengungkapan Sukarela

Tingkat pengelolaan hutang adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Omar & Simon, 2011). Tingkat pengelolaan hutang merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi dalam struktur modalnya rentan terhadap biaya (Suta & Laksito, 2012). Hardiningsih (2008) mengungkapkan bahwa tingkat pengelolaan hutang berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan hutang atau modal yang berasal dari pemegang saham.

Menurut Hardiningsih (2008), semakin tinggi tingkat pengelolaan hutang perusahaan, maka akan semakin luas tingkat pengungkapan sukarela yang akan diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin luas pengungkapan sukarela dapat membantu perusahaan dalam menghilangkan keraguan para kreditor dan pengungkapan yang dilakukan merupakan kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham (Suta & Laksito, 2012).

Semakin tinggi tingkat pengelolaan hutang suatu perusahaan maka akan semakin besar pula *agency cost* atau dengan kata lain semakin besar kemungkinan

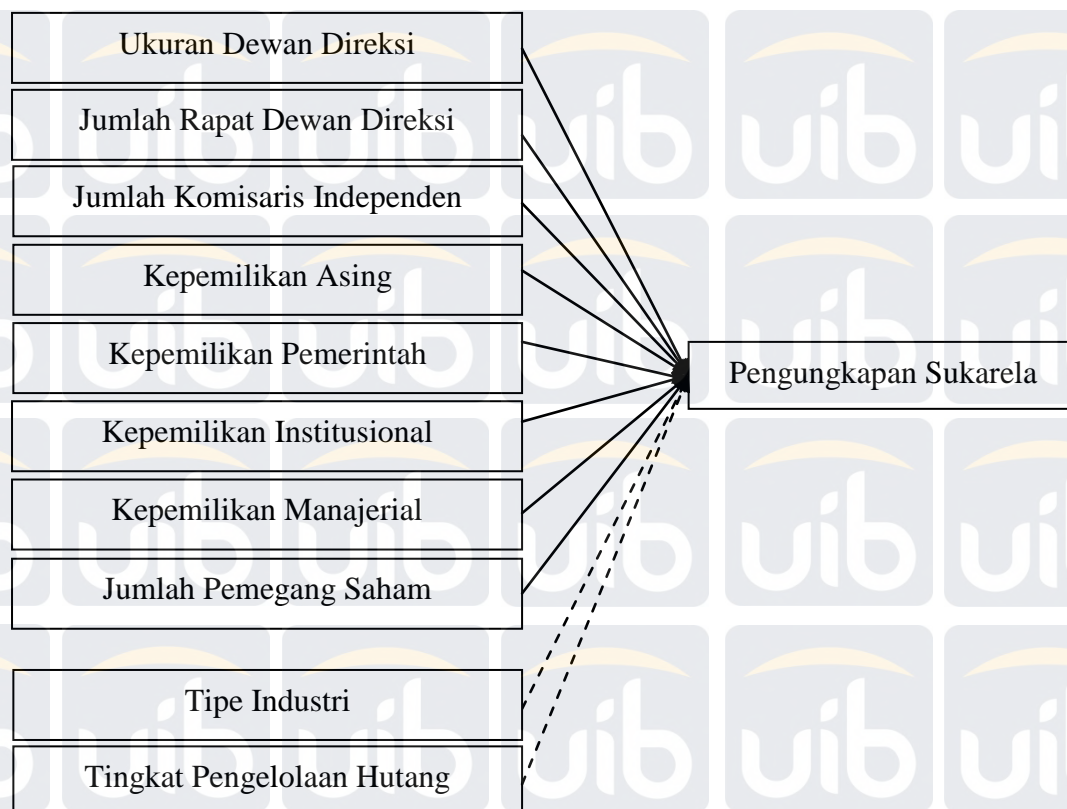
terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang kepada pemegang saham dan manajer. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut perusahaan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk pengungkapan sukarela guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Meek *et al.*, 1995).

Percy (2000), Barako (2006), Hossain dan Mitra (2006), Barako *et al.* (2007), Samaha dan Dahawy (2010), Al-Akra *et al.* (2010), Omar dan Simon (2011), Kolsi (2012), Chakroun dan Matoussi (2012), Juhmani (2013), Dhouibi dan Mamoghli (2013), Yang *et al.* (2013), Wen Qu *et al.* (2013), Hassan (2013), dan Hamour (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara tingkat pengelolaan hutang terhadap pengungkapan sukarela. Akhtaruddin dan Haron (2010), Nandi dan Ghosh (2012), Kateb (2012), Fathi (2013), Uyar *et al.* (2013), Mukhtar dan Ramasamy (2013), Baros *et al.* (2013), dan Dashti *et al.* (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara tingkat pengelolaan hutang terhadap pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian Hardiningsih (2008) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat pengelolaan hutang dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin *et al.* (2009), Mensah (2012), Htay (2012), Dominguez *et al.* (2013), dan Sartawi *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pengelolaan hutang terhadap pengungkapan sukarela.

2.13 Model Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela. Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Model penelitian analisis pengaruh karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.14 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan model penelitian yang digambarkan diatas dengan menggunakan variabel kontrol yang terdiri atas tipe industri dan tingkat pengelolaan hutang, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh signifikan positif jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela.

H₂: Terdapat pengaruh signifikan positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan sukarela.

H₃: Terdapat pengaruh signifikan positif jumlah komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela.

H₄: Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela.

H₅: Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan sukarela.

H₆: Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.

H₇: Terdapat pengaruh signifikan negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.

H₈: Terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah pemegang saham terhadap pengungkapan sukarela.